

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Timbul dan berkembangnya profesi akuntan publik di suatu negara adalah sejalan dengan berkembangnya perusahaan dan berbagai bentuk badan hukum perusahaan di negara tersebut. Jika perusahaan-perusahaan di suatu negara berkembang sedemikian rupa sehingga tidak hanya memerlukan modal dari pemiliknya, namun mulai memerlukan modal dari kreditur, dan jika timbul berbagai perusahaan berbentuk badan hukum perseroan terbatas yang modalnya berasal dari masyarakat, jasa akuntan publik mulai diperlukan dan berkembang.

Berdasarkan uraian tersebut, dari profesi akuntan publik inilah masyarakat, kreditur dan investor mengharapkan penilaian yang bebas tidak memihak terhadap informasi yang disajikan dalam laporan keuangan oleh manajemen perusahaan. Profesi akuntan publik bertanggung jawab untuk menaikkan tingkat keandalan laporan keuangan perusahaan-perusahaan, sehingga masyarakat memperoleh informasi keuangan yang andal sebagai dasar untuk pengambilan keputusan ekonomi.

Ada beberapa jenis auditor salah satunya adalah auditor eksternal atau independen yang bekerja untuk kantor akuntan publik dan statusnya diluar struktur

perusahaan yang mereka audit. Umumnya auditor eksternal menghasilkan laporan atas *financial audit* atau audit atas laporan keuangan.

Audit atas laporan keuangan merupakan suatu bentuk jasa profesi yang dilakukan oleh kantor akuntan publik (KAP). Menurut Nirmala dan Cahyonowati (2013), profesi akuntan publik adalah profesi yang bertanggung jawab untuk menaikkan tingkat keandalan laporan keuangan. Salah satu jasa akuntan publik adalah memberikan informasi yang akurat dan dapat dipercaya untuk pengambilan keputusan bagi para pengguna. Seperti yang dikatakan Manita et al. (2011), tujuan dari audit seperti yang didefinisikan oleh standar IFAC (Federasi internasional akuntan) adalah untuk memungkinkan penggambaran pendapat atas keandalan opini yang disediakan oleh dokumen keuangan. Untuk mencapai tujuan ini, auditor menggunakan metodologi yang sesuai dengan standar audit. Kualitas aktual menunjukkan tingkat risiko terjadinya kesalahan material dalam laporan keuangan yang dapat dikurangi oleh auditor, sedangkan persepsi kuantitas menunjukkan tingkat kepercayaan para pengguna laporan keuangan terhadap efektifitas auditor dalam mengurangi salah saji material dalam laporan keuangan yang dibuat oleh manajemen ( Jackson et al, 2008).

Materialitas salah saji adalah besarnya nilai yang dihilangkan atau salah saji informasi akuntansi, yang dilihat dari keadaan yang melingkupi, dapat mengakibatkan perubahan atau pengaruh terhadap pertimbangan orang yang meletakkan kepercayaan terhadap informasi tersebut karena adanya penghilangan atau salah saji itu. Definisi materialitas salah saji mengharuskan auditor untuk mempertimbangkan baik keadaan yang berkaitan dengan entitas dan kebutuhan

informasi pihak yang akan meletakkan kepercayaan atas laporan keuangan auditan (Mulyadi, 2013;158). Demikian juga menurut Suryanita Weningtyas, et al (2006) yang menyatakan bahawa saat auditor menetapkan materialitas salah saji yang melekat pada laporan keuangan yang diaudit rendah maka adanya kecenderungan bagi auditor untuk mengabaikan prosedur audit tertentu, dengan asumsi jika ditemukan salah saji dari laporan keuangan yang diaudit nilainya tidak material sehingga tidak berpengaruh pada opini audit.

Menurut Faux (2012), pengungkapan informasi material, salah satu masalah yang paling signifikan dalam akuntansi, adalah didasarkan pada gagasan bahwa materialitas merupakan pusat paradigma keputusan kegunaan dalam akuntansi. Gagasan materialitas mengandaikan kemampuan akuntan untuk menentukan apakah penilaian pada materialitas mempengaruhi keputusan pengguna. Untuk akhir ini, heuristik diukur telah digunakan untuk menentukan relevansi materialitas. Namun, heuristik kuantitatif atau ambang batas yang memberikan panduan tentang penilaian materialitas belum diadopsi secara global. Audsabumrungrat dan Sompong (2012) menyatakan pertimbangan materialitas menjadi penting bagi auditor karena akan berkaitan dengan evaluasi resiko, dimana pertimbangan inilah yang akan mempengaruhi cara-cara pencapaian tujuan audit, ruang lingkup dan arah pekerjaan terperinci serta disposisi kesalahan dan kelalaian.

Pertimbangan auditor tentang materialitas salah saji merupakan masalah kebijakan profesional dan dipengaruhi oleh persepsi auditor tentang kebutuhan yang beralasan dari laporan keuangan (Minanda, 2013). Penetapan tingkat materialitas salah saji membantu auditor dalam merencanakan bukti yang cukup

dalam proses pengauditan. Jika auditor menetapkan tingkat materialitas yang rendah, maka jumlah bukti yang harus dikumpulkan lebih banyak dalam proses pengauditan (Ekawati, 2013). Konsep materialitas salah saji penting selama proses audit, mulai dari perencanaan audit sampai pada mengevaluasi hasil pengujian audit. Pertimbangan profesional menentukan apa yang dianggap sebagai bahan pada setiap fase ini proses audit (Houghton et al., 2011).

Dalam membuat kebijakan mengenai tingkat materialitas, auditor biasanya menentukan terlebih dahulu mengenai batas nilai materialitas, sehingga hal ini dapat bermanfaat dalam menentukan apakah terdapat kekeliruan atau salah saji yang material atau tidak. Semakin kecil tingkat materialitas yang ditetapkan oleh auditor, maka auditor harus mencari bukti lebih banyak agar auditor memperoleh keyakinan atas audit yang dilakukan. Mengapa auditor harus mempertimbangkan dengan baik penaksiran materialitas pada tahap perencanaan audit, karena seorang auditor harus bisa menentukan berapa jumlah rupiah materialitas suatu laporan keuangan kliennya (Kinanti, 2013).

Untuk fenomena yang terjadi di Indonesia tentang pertimbangan materialitas salah saji dan sampai saat ini masih berlarut adalah kasus yang menimpa Bank Century, kasus yang terjadi adalah penyimpangan yang dilakukan oleh Bank Century terhadap laporan keuangan yang dikeluarkan. Laporan keuangan yang dikeluarkan oleh Bank Century yang dianggap menyesatkan ternyata banyak sekali terjadi kesalahan yang material. Disini peran auditor sangat dibutuhkan untuk memeriksa laporan keuangan tersebut. Hasil audit BPK tentang Century dianggap menyesatkan antara lain dikarenakan audit investigasi Badan

Pemeriksaan Keuangan memuat “dosa” LPS (Lembaga Penjamin Simpanan) yang belum secara resmi menetapkan perhitungan perkiraan biaya penanganan Bank Century secara keseluruhan. Hal tersebut dapat muncul karena adanya penghilangan informasi fakta material, atau adanya fakta material yang salah, dan dapat menyebabkan ketidaktepatan opini yang diberikan oleh akuntan publik karena banyak ditemukan kesalahan yang material oleh auditor pada saat melakukan pemeriksaan laporan keuangan. Sehingga, auditor tersebut sulit untuk menemukan bukti-bukti yang riil dan sulit untuk menerbitkan jenis opini pada Bank Century tersebut. (Sumber: Kompas, 2011)

Pada akhirnya semua hal ini kembali ke masing-masing individu auditornya dalam melaksanakan jasa profesionalnya yang menuntut Independensi, Kompetensi, Obyektifitas, Integritas yang tinggi.

Ada dua karakteristik terpenting yang harus ada dalam laporan keuangan adalah relevan (*relevance*) dan dapat diandalkan (*reliable*). Kedua karakteristik tersebut sangatlah sulit untuk diukur, sehingga para pemakai informasi membutuhkan jasa pihak ketiga yaitu auditor independen untuk memberi jaminan bahwa laporan keuangan tersebut relevan dan dapat diandalkan, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan semua pihak yang berkepentingan dengan perusahaan tersebut (Singgih & Bawono, 2010).

Independensi auditor penting dalam konteks kualitas audit karena audit independen sangat penting untuk kredibilitas dan integritas laporan keuangan. Kurangnya kemandirian mengganggu kemampuan auditor untuk melaksanakan

penilaian audit yang obyektif dan mempengaruhi kepercayaan diri dalam proses audit (Susanti, 2013).

Fungsi pokok akuntan publik adalah melakukan pemeriksaan umum atas laporan keuangan perusahaan dan memberikan opini atas kewajaran laporan keuangan setelah melakukan prosesur audit. Karena perannya yang sangat strategis, maka profesi akuntan publik di samping diawasi oleh organisasi profesi itu sendiri, juga diawasi oleh beberapa institusi pemegang otoritas (Agoes dan Ardana, 2013). Auditor yang independen dalam melakukan pekerjaannya tidak hanya berpaku pada satu kepentingan klien saja tetapi kepentingan banyak pihak diantaranya para pemegang saham dan para pemakai informasi auditan dan dalam meningkatkan kinerjanya dituntut untuk memiliki profesionalisme dalam melakukan audit atas laporan keuangan.

Kasus pelanggaran independensi yang dilakukan akuntan publik Justinus Aditya Sidharta, di mana ia melakukan kesalahan dalam mengaudit laporan keuangan PT. Great River Internasional, Tbk memunculkan suatu paradigma di mana masalah tersebut tidak mampu dibaca oleh akuntan publik yang mengaudit laporan keuangan tersebut atau sebenarnya telah terbaca oleh auditor tersebut namun auditor tersebut sengaja memanipulasi laporan keuangan tersebut, maka independensi auditor tersebut patut dipertanyakan kembali (Benny, 2010).

Menurut Cheng, et al (2002) menyatakan kompetensi auditor adalah seseorang yang memiliki *knowledge* ( pendidikan, keahlian dan pengalaman) dan sikap serta perilaku etis dalam bekerja, sehingga dengan kompetensi yang dimiliki

seseorang mampu menunjukkan suatu perestasi. Kompetensi dalam pengauditan merupakan pengetahuan, keahlian dan pengalaman yang dibutuhkan auditor untuk dapat melakukan audit secara objektif, cermat dan seksama (Kharismatuti, dkk 2012).Demikian yang dikemukakan oleh Deeprise (2006) menyatakan bahwa seorang yang kompeten akan lebih mudah dalam melaksanakan pekerjaannya dibanding orang yang tidak kompeten.

Halim Alamsyah (2011) menyatakan bahwa pada kasus PT. Bank Mega, Tbk., KAP KPMG (Klynveld Peat Marwick Goerdeler) lalai dalam melaksanakan proses auditnya karena KPMG tidak menemukan adanya penggelapan dua dana nasabah, yaitu PT Elnusa, Tbk dan Pemkab. Batubara pada rentang 2009-2010 masing-masing sebesar Rp111 Milyar dan Rp80 Milyar. Seharusnya seorang auditor harus bisa menemukan kecurangan-kecurangan yang dilakukan baik disengaja maupun tidak disengaja oleh manajemen perusahaan, di mana seorang auditor harus memiliki kemampuan maupun keahlian teknis dalam memahami bisnis kliennya.

Mc. Enroe et al (2001) menyatakan bahwa: “*auditor and Investor perceptions of the expectation gap*”, dalam hal ini *expectation gap* menunjukkan bahwa investor sebagai salah satu pemakai laporan keuangan memiliki harapan yang lebih atas pekerjaan yang dilakukan oleh akuntan publik. Maka dari itu auditor diharapkan memiliki persyaratan seperti yang dinyatakan dalam Pernyataan Standar Auditing yakni kompetensi (Singih dan Bawono, 2010).

Memasuki era modern, di mana perkembangan teknologi informasi bergerak cepat, banyak organisasi yang semakin bergantung pada teknologi informasi (*Information Technologi or IT*) untuk menyimpan informasi dan mendukung proses bisnis. Di seluruh dunia, termasuk Indonesia, sejumlah besar data bisnis disimpan dalam bentuk data elektronik, bahkan dengan tidak disertai dokumen kertasnya (*paperless documentation*). Penggunaan sistem akuntansi berbasis komputer untuk menggantikan sistem manual, secara otomatis akan mengurangi atau bahkan meninggalkan dokumen konvensional (*hard copy*) yang bersifat *verifiable evidence*, sehingga *hard copy* bukan lagi menjadi bagian utama tujuan pencatatan. Dokumen tersebut digantikan dengan sinyal kode *binary digit* dalam bahasa komputer yang *intangible*.

Teknologi akan mempengaruhi metode pengumpulan bukti audit. Kebutuhan terhadap auditing terkomputerisasi yang dinamakan EDP (*Electronic Data Processing*) atau PDE (Proses Data Elektronik) semakin diperlukan agar tujuan audit dapat dicapai secara efektif dan efisien. Pelaksanaan audit EDP jauh lebih luas dibandingkan dengan auditing konvensional karena pemeriksaan juga harus dilakukan terhadap integritas yang terdapat dalam perangkat keras dan lunak, serta organisasi pelaksana EDP dalam mencapai efisiensi dan efektivitas (Reza Fahlevi, 2016).

Fenomena mengenai EDP Audit dikutip dari laman Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (PPPK), Ikatan Akuntan Publik Indonesia (IAPI) sebagai lembaga yang menaungi Akuntan Publik Indonesia (API) tidak tinggal diam atas problematika yang terjadi. Pusat Pengembangan Profesi Keuangan (PPPK) dan



Ikatan Akuntan Publik Indonesia (IAPI) berkewajiban mewujudkan iklim yang kondusif dalam rangka terciptanya sikap integritas, Independen dengan mengembangkan aplikasi audit bernama ATLAS (*Audit Tool and Linked Archived System*), aplikasi tersebut ditunjukkan untuk menjadi dasar bagi Kantor Akuntan Publik (KAP) maupun Akuntan Publik (AP) dalam memberikan jasa audit. Selain itu, penggunaan aplikasi ini merupakan penerapan dari konsep EDP Audit pada Kantor Akuntan Publik (KAP), karena berfungsi sebagai sarana pengawasan bagi regulator dalam hal ini Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (PPPK) atas adjustment auditor saat pemberian opini pada laporan keuangan. (Rifki Okta, 2018)

Berdasarkan keterangan tersebut, dianjurkan bagi auditor mempelajari keahlian baru untuk bekerja secara efektif dalam suatu lingkungan bisnis yang terkomputerisasi untuk mereview teknologi komputer. Auditor harus memahami dan mempertimbangkan sifat sistem EDP yang bisa mempengaruhi sistem akuntansi dan sistem pengendalian intern yang akan mempengaruhi tingkat materialitas salah saji dalam audit atas laporan keuangan

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul adalah **“Pengaruh Kompetensi, Independensi dan Penerapan EDP Audit Terhadap Pertimbangan Materialitas Salah Saji dalam Laporan Keuangan”**.

## **1.2 Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah**

### **1.2.1 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan fenomena yang telah penulis uraikan, maka dapat diidentifikasi masalah pokok sebagai berikut:

1. Masih terdapat auditor yang belum bisa mengungkap materialitas salah saji laporan keuangan yang diauditnya
2. Masih terdapat auditor eksternal belum memiliki keahlian atau kompetensi yang memadai dalam mengaudit laporan keuangan suatu perusahaan.
3. Masih terdapat auditor yang tidak bersikap independen dalam melaksanakan penugasan audit.
4. Masih terdapat auditor yang tidak memiliki kemampuan EDP audit yang memadai

### **1.2.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, rumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Kompetensi Auditor pada Kantor Akuntan Publik di Kota Bandung.
2. Bagaimana Independensi Auditor pada Kantor Akuntan Publik di kota Bandung.
3. Bagaimana EDP Audit pada Kantor Akuntan Publik di Kota Bandung.
4. Bagaimana Pertimbangan Materialitas Salah Saji pada Kantor Akuntan Publik di Kota Bandung.

5. Bagaimana hubungan Kompetensi, Independensi Auditor dan Penerapan EDP Audit Auditor pada Kantor Akuntan Publik di Kota Bandung.
6. Seberapa besar pengaruh Kompetensi Auditor terhadap Pertimbangan Materialitas Salah Saji pada Kantor Akuntan Publik di Kota Bandung.
7. Seberapa besar Pengaruh Independensi Auditor terhadap Pertimbangan Materialitas Salah Saji pada Kantor Akuntan Publik di Kota Bandung.
8. Seberapa besar Pengaruh EDP Audit terhadap Pertimbangan Materialitas Salah Saji pada Kantor Akuntan Publik di Kota Bandung.
9. Seberapa besar Pengaruh Kompetensi, Independensi dan EDP Audit secara simultan terhadap Pertimbangan Materialitas Salah Saji pada Kantor Akuntan Publik di Kota Bandung.

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah, penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui Kompetensi Auditor pada Kantor Akuntan Publik di Kota Bandung
2. Untuk mengetahui Independensi Auditor pada Kantor Akuntan Publik di kota Bandung
3. Untuk mengetahui EDP Audit pada Kantor Akuntan Publik di Kota Bandung
4. Untuk mengetahui Pertimbangan Materialitas Salah Saji pada Kantor Akuntan Publik di Kota Bandung
5. Untuk mengetahui hubungan Kompetensi, Independensi dan EDP Audit pada Kantor Akuntan Publik di Kota Bandung

6. Untuk mengetahui besarnya pengaruh Kompetensi Auditor terhadap Pertimbangan Materialitas Salah Saji pada Kantor Akuntan Publik di Kota Bandung
7. Untuk mengetahui besarnya Pengaruh Independensi Auditor terhadap Pertimbangan Materialitas Salah Saji pada Kantor Akuntan Publik di Kota Bandung
8. Untuk mengetahui besarnya Pengaruh EDP Audit terhadap Penrtimbangan Materialitas Salah Saji pada Kantor Akuntan Publik di Kota Bandung
9. Untuk mengetahui besarnya Pengaruh Kompetensi, Independensi dan EDP Audit secara simultan terhadap Pertimbangan Materialitas Salah Saji pada Kantor Akuntan Publik di Kota Bandung

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

##### **1.4.1 Kegunaan Teoritis**

Kegunaan teoritis ini diharapkan dapat memberikan pengembangan serta wawasan yang lebih luas mengenai Kompetensi Auditor, Independensi dan Profesionalisme Auditor . Selain itu juga diharapkan menjadi bahan pengembangan pengetahuan dibidang audit eksternal.

##### **1.4.2 Kegunaan Praktis**

###### **1. Bagi penulis**

Dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan ilmu yang lebih luas baik dari sisi teori maupun prakteknya. Dengan adanya penelitian ini

dapat menambah wawasan mengenai Kompetensi, Independensi, EDP Audit terhadap Pertimbangan Materialitas Salah Saji pada Kantor Akuntan Publik di Kota Bandung. Selain itu penelitian ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana ekonomi program studi akuntansi di Universitas Pasundan Bandung.

## 2. Bagi Pihak Lain

Penelitian ini dapat memberikan suatu tambahan pengetahuan dan dapat menjadi referensi bagi pihak yang akan mengkaji topik yang berhubungan dengan penelitian ini.

### **1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan pada Kantor Akuntan Publik di Kota Bandung mulai tanggal April sampai Agustus 2021.